

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KONSERVASI
MANGROVE BAROS DI DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK
KABUPATEN BANTUL**

Devi Arianti¹ dan Lena Satlita²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹*devi.arianti@student.uny.ac.id*

²*lensa@uny.ac.id*

Abstract

This study aimed to know and deeply understand the Collaborative Governance process in the development of Baros's Mangrove Conservation and its inhibiting factors. The research design used was descriptive with qualitative approach. The results of this study indicated that Collaborative Governance process in the development of Baros's Mangrove Conservation that was done with the concept of agro silvo fishery had been done by government, private, and community. However, the Collaborative Governance process had not been optimally implemented, it could be seen from the inhibiting factors that occurred that were: there was no communication forum, there was still sectoral ego, the limited resources, and the private involvement was less than the maximum.

Keywords: *Collaborative Governance, Actor, and Mangrove Development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros beserta hambatannya. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros dilakukan dengan konsep *agro silvo fishery* sudah dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun proses *Collaborative Governance* belum optimal dilaksanakan, hal ini ditandai dengan adanya hambatan yang terjadi yaitu belum ada forum komunikasi, masih terdapat ego sektoral, keterbatasan sumber daya, dan keterlibatan swasta yang kurang maksimal.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Aktor, dan Pengembangan Mangrove*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan benntangan garis pantai tersebut tidak lain merupakan wilayah pesisir yang sangat produktif. Wilayah pesisir merupakan wilayah produktif yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah sehingga banyak pihak memanfaatkan keberadaannya. Kekayaan sumberdaya pesisir yaitu salah satunya hutan mangrove. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2017, Indonesia memiliki luas hutan mangrove 3,48 juta hektare. Jumlah tersebut merupakan 19% dari total luas hutan mangrove di dunia, sehingga Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam pengembangan hutan mangrove.

Pentingnya keberadaan hutan mangrove ini tidak sejalan dengan lestarnya hutan mangrove yang ada di Indonesia. Hutan mangrove di Indonesia saat ini mengalami penurunan fungsi dan terjadi kerusakan baik kualitas maupun kuantitas. Sehingga diperlukan adanya upaya pelestarian.

Salah satu kawasan konservasi hutan mangrove yang ada di Indonesia dan khususnya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Konservasi Hutan Mangrove Baros yang ada di Dusun Baros Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Kawasan konservasi ini

berada di Muara Sungai Opak. Adanya kawasan konservasi ini didukung dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul. Dimana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah provinsi, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Pada mulanya, Konservasi Hutan Mangrove Baros ini dirintis oleh LSM Relung bersama masyarakat setempat yang prihatin terhadap kondisi pesisir selatan Pulau Jawa yang rentan terhadap abrasi serta tingginya kadar garam yang dibawa oleh angin laut yang sangat ekstrim, padahal di sisi utara pesisir ini merupakan lahan pertanian yang subur. Sehingga pada tahun 2003 mulai pertama kali ditanam tumbuhan mangrove. Diharapkan dengan adanya ekosistem mangrove ini, dapat membantu masyarakat sekitar lebih produktif dalam pengelolaan pertanian, serta dapat menjadikan ttempat tumbuh dan berkembang biak flora dan fauna endemik mangrove sehingga dapat dijadikan wadah untuk penelitian. Selanjutnya pada tahun

2006, kegiatan konservasi mangrove ini dilimpahkan oleh Keluarga Pemuda Pemudi Baros (KP2B).

Bentuk kegiatan utama dari Konservasi Mangrove Baros ini, berupa penanaman, pemeliharaan, dan wisata minat khusus yang dibantu pihak-pihak lain. Konsep dari pengembangan Konservasi Mangrove Baros ini adalah menggunakan konsep *agro silvo fishery*. Konsep ini merupakan salah satu usaha yang mempunyai tujuan ganda yaitu ekologi dan ekonomi. Secara ekologi melaksanakan konservasi mangrove dan usaha peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pertanian dan perikanan.

Namun, dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros ini, masih terdapat berbagai masalah salah satunya yaitu keadaan alam yang tidak dapat diprediksi juga merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh pengelola, seperti sering terjadinya banjir kiriman dari hulu Sungai Opak. Banyaknya sampah di Muara Sungai Opak yang merusak pemandangan kawasan Konservasi Mangrove Baros yang seharusnya alami, dan juga mengganggu perkembangan pohon mangrove atau bibit mangrove. Selain itu, kurangnya edukasi akan pentingnya hutan mangrove ini, menyebabkan masih ada masyarakat asing (bukan masyarakat lokal Dusun Baros) yang

memburu satwa di wilayah Konservasi Mangrove Baros.

Pengembangan Konservasi Mangrove Baros ini memerlukan kolaborasi peran antar aktor yang terlibat dalam Konservasi Mangrove Baros ini. Partisipasi aktif antar aktor sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros ini. Beberapa instansi yang terlibat harus memiliki tujuan bersama. Dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros terlihat adanya kolaborasi antar aktor yaitu pemerintah, swasta, serta masyarakat. Peran pemerintah yaitu sebagai fasilitator, swasta sebagai mitra untuk membantu dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros, serta masyarakat dan juga KP2B sebagai pelaku utama konservasi.

Tetapi pada pelaksanaannya kolaborasi yang terjalin antara instansi pemerintah dengan non instansi pemerintah dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros kurang optimal karena masih adanya tumpang tindih kepentingan. Ada beberapa pihak yang melakukan programnya tanpa memperhatikan program dari pihak lain. Belum optimalnya kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholders terkait pengembangan Konservasi Mangrove Baros berakibat ditandai dengan belum adanya kepercayaan antar aktor, masih kurangnya

kesadaran dan belum adanya kerjasama secara keseluruhan.

Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* yang berlangsung dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul belum optimal. Penelitian *Collaborative Governance* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi dan faktor penghambat yang ada dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros.

Menurut DeSeve tahun 2007 untuk mengukur keberhasilan *Collaborative Governance* dapat diukur melalui delapan indikator yaitu 1) *Network structure*, 2) *Commitment to a common purpose*, 3) *Trust among the participants*, 4) *Governance*, 5) *Access to authority*, 6) *Distributive accountability atau responsibility*, 7) *Information sharing* dan 8) *Access to resources*.

Proses *Collaborative Governance* melalui beberapa tahapan. Morse and Stephens (2012:567) membagi tahapan *Collaborative Governance* ke dalam 4 tahapan, yaitu:

1. *Assesment* (Penilaian)
2. *Initiation* (Inisiasi)
3. *Deliberation* (Musyawarah)
4. *Implementation* (Implementasi) .

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator proses *Collaborative Governance* dari Anshell dan Gash tahun 2007 yaitu: : (1) *Face to face dialogue* (dialog/tatap muka), (2) *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), (3) *Commitment to Process* (Komitmen Bersama), (4) *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama), dan (5) *Intermedite outcome* (Pencapaian hasil).

Teori *Collaborative Governance* dari Ansell and Gash (2007:550) dipilih karena dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan memahami bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran, masukan, dan rekomendasi kepada stakeholder yang terlibat untuk lebih meningkatkan peran masing-masing dalam pelaksanaan program.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Tirtohargo dan instansi non pemerintah yaitu Yayasan Kanopi Indonesia dan Paguyuban Pengamat Burung Jogja. Penelitian ini dilaksanakan mulai Maret 2018 sampai dengan April 2018.

Subjek penelitian ini meliputi: 1) Staff Bidang Kelautan dan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, 2) Kepala Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY, 3) Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 4) Staff Seksi Pemeliharaan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 5) Staff Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 6) Staff Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Desa Tirtohargo, 7) Sekretaris Yayasan Kanopi Jogja, 8) Pengurus Paguyuban Pengamat Burung Jogja, 9) Koordinator Seksi Konservasi Keluarga Pemuda-Pemudi Baros, 10) Tokoh Masyarakat Dusun Baros.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Ilmu Administrasi Publik terdapat pendekatan yang sesuai untuk menganalisis hubungan antar stakeholder

dalam suatu pemerintahan yang disebut *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* merupakan proses interaksi atau kerjasama yang saling menguntungkan antar aktor baik pemerintah maupun non-pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah publik secara bersama-sama karena adanya persamaan visi yang apabila dilakukan secara sendiri-sendiri akan terasa sulit. Menurut Anshell dan Gash dalam Sudarmo (2011:101) kolaborasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti normatif.

Dalam kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros, bisa dikategorikan ke dalam kolaborasi dalam arti proses. Hal ini dikarenakan kolaborasi yang terjadi dilakukan secara interaktif antar aktor nya dan cenderung bersifat formal, bukan hanya berperilaku saja, selain itu peneliti di sini berusaha untuk menganalisis atau meneliti proses kolaborasi di antara pemerintah dan institusi-institusi terkait untuk secara efektif melaksanakan pengembangan Konservasi Mangrove Baros tersebut. Menurut penelitian terdahulu oleh Tri Harjanti tahun 2016 yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Penanganan Masalah Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat Industri

Alkohol di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo membahas collaborative dalam arti proses karena peneliti berusaha menganalisis proses kolaborasi antara pemerintah dengan intitusi-institusi lain terkait untuk menurunkan dampak pencemaran atau menyelesaikan masalah pencemaran akibat limbah industri alkohol.

Kolaborasi dalam arti proses yang terjadi dilakukan secara interaktif baik oleh pemerintah dengan lembaga non pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros. Dilatarbelakangi oleh pentingnya ekosistem mangrove bagi warga sekitar serta kawasan Konservasi Mangrove Baros yang merupakan kawasan yang bernilai manfaat tinggi, maka pengembangan Konservasi Mangrove Baros perlu dilakukan guna pelestarian dan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Seperti yang dijelaskan oleh penelitian Sukoco Hadi Santoso (2016) bahwa pengembangan Konservasi Mangrove Baros perlu dilakukan karena adanya nilai manfaat yang tinggi terutama bagi masyarakat sekitar serta menurunkan tingkat abrasi pantai di pesisir selatan Jawa. Karena ekstrimnya kondisi alam pesisir selatan Jawa ini dan kondisi ekosistem mangrove Baros yang tergolong masih baru,

sehingga dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros tidaklah mudah diperlukan kerjasama antara Pemerintah dengan instansi-instansi lain maupun masyarakat setempat. Disebutkan dalam penelitian Sukoco Hadi Santoso tahun 2016 bahwa dalam program konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove, pemerintah lebih berperan hanya sebagai mediator dan fasilitator (mengalokasikan dana melalui mekanisme yang ditetapkan), sementara masyarakat sebagai pelaksana yang mampu mengambil inisiatif.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan Konservasi Mangrove Baros tidak hanya dilakukan oleh salah satu stakeholder saja sehingga diperlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kewenangan yang sama dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros. Pengembangan Mangrove Baros dilakukan oleh pemerintah yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan Pemerintah Desa Tirtohargo. Sedangkan keterlibatan swasta yaitu dari Yayasan Kanopi Indonesia dan Paguyuban Pengamat Burung Jogja serta dari pihak masyarakat dan pengelola yaitu Keluarga Pemuda – Pemudi Baros (KP2B). Sayangnya proses *Collaborative Governance* dalam

pengembangan Konservasi Mangrove Baros yang meliputi keterlibatan aktor kurang menyeluruh, terutama keterlibatan swasta. Penelitian ini menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros untuk mengetahui bagaimana proses *Collaborative Governance* serta hambatan terkait proses yang terjadi.

***Collaborative Governance* Process dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros**

Dalam indikator proses kolaboratif dalam model *Collaborative Governance* menurut Anshell dan Gash tahun 2007 berikut :

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Menurut Ansell and Gash, *Collaborative Governance* dibangun melalui dialog atau komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan (stakeholders). Proses dari *Collaborative Governance* berorientasi pada konsensus atau kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi. Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.

Menurut penelitian terdahulu oleh Tri Harjanti tahun 2016 yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Penanganan Masalah Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat Industri Alkohol di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, bahwa dialog tatap muka dilakukan dengan diadakan pertemuan langsung bersama para stakeholder yang terkait untuk membahas tentang masalah pencemaran sungai akibat limbah industri alkohol serta diadakannya pelatihan dan sosialisasi.

Sama halnya dalam penelitian ini yaitu tentang pengembangan Konservasi Mangrove Baros, bahwa dalam *face to face dialogue* atau dialog tatap muka yang dilakukan antar stakeholder berupa pelatihan maupun sosialisasi. Pelatihan dan sosialisasi ini dilakukan oleh masing-masing instansi yang terkait sesuai tupoksinya masing-masing. Di dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi tersebut juga terkadang di undang stakeholder terkait yang biasanya sebagai narasumber sehingga tujuan dari pelatihan dan sosialisasi tersebut dapat tersampaikan. Pelaksanaan proses kolaborasi dalam *face to face dialogue* terjadi saat adanya sifat saling melengkapi antar stakeholder yang terkait.

Selanjutnya pelatihan dan sosialisasi dilakukan untuk memudahkan komunikasi serta mencapai tujuan bersama dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros

khususnya dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros dengan konsep *agro silvo fishery*. Selain memudahkan komunikasi juga sarana dalam membangun kepercayaan antar stakeholder. Hal ini dapat dilihat apabila stakeholder yang terkait mampu dan memberikan sosialisasi maupun pelatihan kepada pengelola maupun masyarakat, hal tersebut menunjukkan adanya keseriusan dari stakeholder tersebut dalam turut serta mengembangkan Konservasi Mangrove Baros.

Selain pelatihan dan sosialisasi, dalam proses *Collaborative Governance* yaitu *face to face dialogue* diperlukan pula suatu forum bersama dimana semua stakeholder yang terkait dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros dapat bertemu langsung sehingga tidak terjadi suatu kesalahpahaman maupun kurangnya pemahaman bersama. Pada tahun 2015, dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros ini, pernah diadakan suatu forum komunikasi di mana anggotanya merupakan semua stakeholder yang berkepentingan di Konservasi Mangrove Baros. Peran masing-masing aktor dalam dialog tatap muka sesuai dengan tujuan masing-masing instansi di pengembangan Konservasi Mangrove Baros yaitu pemerintah sebagai fasilitator, pengelola sebagai pelaksana teknis di lapangan serta swasta sebagai mitra antara pemerintah dan

pengelola. Dalam forum komunikasi tersebut semua stakeholder memiliki tujuan bahwa pengembangan Konservasi Mangrove Baros tersebut bertujuan untuk pelestarian alam sehingga dapat bermanfaat secara optimal bagi masyarakat sekitar. Namun, pada tahun 2016 setelah adanya perpindahan tanggungjawab dari pemerintah daerah kabupaten ke pemerintah daerah provinsi, forum komunikasi tersebut selanjutnya bubar dan sudah ditiadakan.

2. *Trust building* (membangun kepercayaan)

Menurut Ansell dan Gash, dalam *Collaborative Governance* process tidak hanya melakukan negosiasi antar aktor, namun lebih kepada membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Karena, kurangnya kepercayaan diantara para stakeholder merupakan salah satu munculnya *Collaborative Governance*. Menurut De Seve dalam Sudarmo (2011:11) dalam ukuran keberhasilan *Collaborative Governance* salah satunya yaitu adanya rasa saling percaya di antara aktor, di mana rasa saling percaya tersebut didasarkan pada hubungan profesional atau sosial; keyakinan bahwa para aktor mempercayakan pada informasi- informasi atau usaha-usaha aktor lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin

bahwa mereka bisa percaya terhadap partner-partner (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintah (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, misalnya) dan partner-partner di luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah disetujui bersama.

Berbeda dengan trust building atau membangun kepercayaan yang dilakukan dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros bahwa dalam membangun kepercayaan di antara pemerintah, swasta, pengelola maupun masyarakat digunakan cara yaitu dengan komunikasi serta koordinasi antar pihak-pihak yang terkait. Komunikasi serta koordinasi ini penting dilakukan agar tujuan dalam pengembangan Konservasi mangrove Baros dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal tersebut dilakukan sebab membangun kepercayaan bukan merupakan hal yang mudah serta perlu dilakukan secara terus menerus. Para pihak yang terlibat juga harus saling memahami maksud dan tujuan yang sebenarnya sehingga diperoleh suatu kesepakatan yang sama-sama menguntungkan antar pihak satu dengan pihak yang lain.

Namun, dalam komunikasi serta koordinasi yang dilakukan dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros

masih bersifat parsial atau sebagian karena komunikasi dan koordinasi yang terjadi belum terjadi keseluruhan. Hal ini disebabkan belum adanya satu forum komunikasi terkait pengembangan Konservasi Mangrove Baros sehingga komunikasi maupun koordinasi hanya terkait satu pihak dengan pihak lain atau dapat dikatakan hanya dua aktor yang terlibat komunikasi serta koordinasi. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pandangan, tumpang tindih kepentingan maupun kegiatan yang sama sehingga tidak tercipta suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien.

Proses kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros bahwa setiap aktor lebih berfokus kepada kepentingan masing-masing dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros. Dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam membangun kepercayaan adalah belum terjalin satu sama lain. Setiap aktor cenderung berfikir individualistis karena lebih mementingkan programnya masing-masing atau masih terdapat ego sektoral dari masing-masing aktor yang terkait.

3. *Commitment to the process* (komitmen terhadap proses)

Dari beberapa rujukan yang telah disimpulkan Ansell dan Gash, tingkat komitmen antar stakeholder merupakan

penentu dari keberhasilan dan kegagalan *Collaborative Governance*. Dalam sebuah survey pada American and Australian collaborative groups, Margerum tahun dalam Ansell dan Gash (2007:559) menemukan bahwa komitmen anggota merupakan faktor paling penting dalam memperlancar collaborative process. Komitmen juga berkaitan dengan motivasi bagi para aktor untuk mengimplementasikan *Collaborative Governance*. Tetapi, menurut Ansell dan Gash, stakeholder tidak ingin kepentingan mereka diabaikan atau hanya sekedar mengamankan posisi mereka. Namun, sebaliknya, sesungguhnya komitmen adalah sebuah keyakinan bahwa dengan collaborative process akan menciptakan keuntungan untuk masing-masing pihak dan kepentingan publik. Komitmen untuk proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan adalah cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan. Prosedur yang jelas, adil, dan transparan sangat penting untuk komitmen.

Proses kolaborasi dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros dalam hal komitmen terhadap proses yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat memiliki tujuan yang sama dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros ini yaitu pelestarian mangrove yang memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar,

dengan pelaksanaan masing-masing stakeholder sesuai tupoksi nya masing-masing. Namun, dalam kerjasama antar stakeholder masih belum optimal, hal ini dibuktikan masih terdapat tumpang tindih kepentingan, maupun ego sektoral yang terjadi antar stakeholder yang terkait.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros ini, komitmen dari para pihak yang terlibat dari masing-masing sudah berjalan baik, masing-masing pihaknya secara sadar dalam menjalankan tugas maupun tanggungjawabnya tetap mengedepankan terwujudnya ekosistem mangrove yang lestari. Tetapi, dalam proses kerjasama antar stakeholder belum berjalan dengan baik karena proses kolaborasi yang dilakukan hanya menguntungkan satu pihak tidak untuk kepentingan publik. Hal ini didasarkan pada kurangnya perundingan atau koordinasi yang dilakukan antar stakeholder terkait pengembangan Konservasi Mangrove Baros.

4. *Shared Understanding* (saling memahami)

Dalam *Collaborative Governance*, para aktor harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama. Inilah yang dimaksud *shared understanding* oleh Ansell dan Gash. *Shared understanding* merupakan kesepakatan tentang pengetahuan yang

relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Dalam proses *Collaborative Governance*, harus memiliki pemahaman bersama untuk menjadi tujuan bersama.

Pada penelitian sebelumnya oleh Tri Harjanti tahun 2016 yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Penanganan Masalah Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat Industri Alkohol di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, bahwa *shared understanding* dilakukan dengan proses *hearing* atau mendengarkan keluhan kesah warga yang mengalami dampak pencemaran limbah tersebut untuk selanjutnya dilakukan penanganan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berbeda dengan penelitian ini, bahwa dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros, *shared understanding* belum optimal. Pemahaman bersama yang seharusnya dimiliki masing-masing instansi untuk mencapai tujuan bersama, tidak berjalan semestinya. Kesepahaman bersama masih kurang, sehingga masih banyak program yang dilakukan oleh masing-masing instansi kurang sinkron. Instansi yang terkait dalam melakukan program maupun kegiatannya tidak memperhatikan program dari instansi lain. Bahkan masing – masing instansi tidak mengetahui program yang dilakukan oleh instansi lain dalam pengembangan

Konservasi Mangrove Baros. Hal ini berakibat adanya program atau kegiatan yang sama dari masing-masing stakeholder. Dapat disimpulkan bahwa *shared understanding* atau pemahaman bersama dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros ini belum terbangun karena masih adanya tumpang tindih kepentingan antar instansi.

5. *Intermediate outcomes* (hasil sementara)

Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi lebih mungkin untuk terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkret dan ketika kolaborasi kemungkinan besar akan berhasil. Meskipun *intermediate outcomes* dapat mewakili output nyata dari hal tersebut, tetapi dalam proses ini *intermediate outcomes* diartikan sebagai hasil proses yang penting untuk membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan ini dapat memberikan *feedback* ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen.

Pada penelitian Tri Harjanti (2016) bahwa dari proses kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa stakeholder diperoleh suatu keputusan bahwa cara mengurangi atau menangani masalah pencemaran limbah alkohol tersebut ialah dengan membangun

suatu IPAL komunal. Akan tetapi, karena adanya kendala dalam penyediaan lahan, maka digunakan alternatif dengan melalui bantuan pihak ketiga yang bisa mengolah limbahnya dengan cara menggunakan tangki tinja yang nantinya dapat mengangkut limbah alkohol tersebut ke daerah yang sudah mempunyai IPAL, untuk selanjutnya mengolah limbah tersebut melalui IPAL yang ada di daerah tersebut.

Berbeda dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros ini bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah pengembangan Konservasi Mangrove Baros yang beriringan dengan pemberdayaan masyarakat serta pelestarian alam. Sehingga adanya Konservasi Mangrove Baros ini dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat setempat, baik dalam bidang pertanian yaitu lahan pertanian masyarakat semakin subur karena terjaganya ekosistem mangrove, semakin tumbuh dan berkembangnya mangrove sehingga dapat menjadi wind barrier atau benteng angin yang membawa kadar garam yang tinggi, di bidang kehutanan bahwa ekosistem mangrove semakin lebat sehingga dapat digunakan tempat berkembang biak flora dan fauna endemik mangrove yang kemudian dapat dijadikan sarana edukasi bagi masyarakat umum, serta di bidang perikanan yaitu adanya Konservasi Mangrove Baros ini dapat menjadi rumah

bagi biota air sehingga mampu mensejahterakan masyarakat sekitar, juga mengurangi abrasi, selain itu juga dapat dijadikan atraksi wisata dalam Eko Eduwisata Konservasi Mangrove Baros tersebut. Sementara itu, intermediate outcomes atau hasil capaian sementara yang dihasilkan adalah adanya kerlibatan masyarakat dalam upaya konservasi serta pemerintah yang mampu bekerjasama menjalankan konsep agro silvo fishery. Masing-masing instansi pemerintah memiliki tupoksinya masing-masing dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros serta sudah menjalankan sesuai tugasnya masing-masing sehingga untuk hasil sementara konsep agro silvo fishery sudah berjalan dengan juga melibatkan swasta dan masyarakat serta pengelola setempat. Selain itu juga adanya pembangunan sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan konservasi maupun kegiatan wisata. Pembangunan sarana prasarana ini dilakukan oleh semua aktor yang terlibat baik pemerintah, swasta, maupun pengelola. Adanya sarana dan prasarana ini mampu meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi serta kegiatan wisata, selain itu juga mampu mengurangi atau meminimalisir masalah teknis yang ada di kawasan Konservasi Mangrove Baros. Hal lain juga adanya anggaran yang disediakan pemerintah dalam kegiatan Konservasi Mangrove Baros ini.

Jadi, intermediate outcomes dilakukan antar aktor dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros sudah sesuai dengan tujuan pengembangan yaitu pelestarian ekosistem dan pemberdayaan masyarakat guna kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat kekurangan yaitu belum optimal dalam pelaksanaannya karena masih terdapat tumpang tindih kepentingan maupun kurangnya kesepahaman bersama antar aktor yang terkait. Hal ini juga disebabkan karena belum adanya dialog tatap muka rutin yang dilakukan para stakeholder terkait pengembangan Konservasi Mangrove Baros sehingga komunikasi dan koordinasi belum berjalan secara maksimal.

SIMPULAN

Collaborative Governance process dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul yang dilakukan dengan konsep *agro silvo fishery* yaitu kegiatan pertanian, perikanan dalam kawasan hutan mangrove dengan tujuan ganda yaitu tujuan ekologi dan ekonomi. *Collaborative Governance process* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros dilakukan oleh pemerintah yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas

Pariwisata Kabupaten Bantul, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Pemerintah Desa Tirtohargo sebagai fasilitator, swasta yaitu Yayasan Kanopi Jogja dan Paguyuban Pengamat Burung Jogja sebagai mitra antara pemerintah dan swasta serta masyarakat dan pengelola sebagai aktor utama. *Collaborative Governance Process* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul belum optimal dilaksanakan, dikarenakan masih ada tumpang tindih kepentingan dan komunikasi yang tidak terarah. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya forum tatap muka yang rutin, kepercayaan antar stakeholder yang terkait belum terjalin satu sama lain masing-masing aktor cenderung berfikir individualistis, dalam hal komitmen, komitmen para pihak yang terlibat dari masing-masing sudah berjalan baik, masing-masing pihaknya secara sadar dalam menjalankan tugas maupun tanggungjawabnya, tetapi, dalam proses kerjasama antar stakeholder belum berjalan dengan baik karena proses kolaborasi yang dilakukan hanya menguntungkan satu pihak tidak untuk kepentingan publik, kesepahaman bersama belum terbangun karena masih adanya tumpang tindih kepentingan antar instansi, sedangkan hasil sementara yaitu sudah sesuai dengan tujuan pengembangan yaitu pelestarian ekosistem

dan pemberdayaan masyarakat guna kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Arimbi Saraswati. (2004). Konsep Pengelolaan Ekosistem Pesisir (Studi Kasus Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah). *Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT*. 5. (3) Hlm 205 – 211.
- Agranoff, Robert dan Mc Guire, Michael. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies Local Government* Washington: Georgetown University Press.
- Anshell and Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Barkley: University of California. Hlm.557-561
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya..
- Ricardo S. Morse and John B. Stephens. (2008). *Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning*. *Journal of Public Affairs Education*. Hlm565-583
- Sabaruddin, A. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Grha Ilmu.
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik*. Solo: Smart Media
- Sukoco Hadi Santoso (2016). *Partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Konservasi Mangrove di Dusun Baros Desa tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul*. Skripsi. Yogyakarta : UNY.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriharyono. (2009). *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tommi Yuniawan, Masrukhi, & Alamsyah . (2014). *Kajian Ekolinguistik Sikap Mahasiswa Terhadap Ungkapan Pelestarian Lingkungan Di Universitas Negeri Semarang*. *Indonesian Journal of Conservation*. Vol .3 No. 1 – Juni 2014
- Tri Harjanti. (2016). “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat Limbah Industri Alkohol di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo”. Skripsi. Solo:Universitas Sebelas Maret
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul.